

PEMBANGUNAN DAERAH

Isep Amas Priatna, Rasyid Widada, Hery Yanto The, Fitriani, Unang Atmaja,
Siska Amelia & Guswandi, Tri Wibowo, Arlis Prayugo, Daelami Ahmad,
Brian L Djumaty, Nina Putri Hayam Dey.



PEMBANGUNAN DAERAH

Isep Amas Priatna, Rasyid Widada, Hery Yanto The, Fitriani, Unang Atmaja,
Siska Amelia & Guswandi, Tri Wibowo, Arlis Prayugo, Daelami Ahmad,
Brian L Djumaty, Nina Putri Hayam Dey.



PEMBANGUNAN DAERAH

Tim Penulis:

**Isep Amas Priatna, Rasyid Widada, Hery Yanto The, Fitriani, Unang Atmaja,
Siska Amelia & Guswandi, Tri Wibowo, Arlis Prayugo, Daelami Ahmad,
Brian L Djumaty, Nina Putri Hayam Dey.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-500-795-3

Cetakan Pertama:

Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Ancaman Keamanan Maritim ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek pembangunan daerah dalam kaitannya dengan keamanan maritim, yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional dan regional.

Buku ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari ruang lingkup pembangunan daerah, kerangka konseptual pembangunan daerah, hingga kebijakan dan perencanaan yang berperan dalam mengatasi tantangan keamanan maritim. Selain itu, pembahasan juga mencakup sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi daerah, serta keuangan dan pendanaan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Tidak kalah penting, buku ini juga mengulas aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat, pemerintahan daerah dan desentralisasi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas ancaman keamanan maritim serta kaitannya dengan berbagai faktor pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para akademisi, praktisi, dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, serta inspirasi dalam proses penulisan buku ini. Tanpa kerja sama dan kontribusi berbagai pihak, buku ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi kebijakan, maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu keamanan maritim dan pembangunan daerah. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keamanan maritim dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik

dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Maret, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAERAH.....	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pembangunan di Bidang Ekonomi.....	4
C. Pembangunan di Bidang Politik	7
D. Pembangunan di Bidang Sosial.....	9
E. Pembangunan di Bidang Pendidikan	11
F. Pembangunan di Bidang Keagamaan	13
G. Pembangunan di Bidang Lingkungan	15
H. Rangkuman Materi	16
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN DAERAH	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Konsep Dasar Pembangunan Daerah	21
C. Urgensi Kerangka Konseptual Dalam Pembangunan Daerah	22
D. Teori dan Konsep Dasar Pembangunan Daerah	23
E. Dimensi Pembangunan Daerah	26
F. Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pembangunan Daerah	29
G. Strategi Pembangunan Daerah.....	32
H. Indikator Pencapaian Pembangunan Daerah	36
I. Rangkuman Materi	40
BAB 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	45
A. Perencanaan Pembangunan Yang Ideal	46
B. Kendala dan Stagnasi Pembangunan Daerah di Indonesia	50
C. Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan	53
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	55
E. Membangun Masa Depan Melalui Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	58
F. Rangkuman Materi	61
BAB 4 SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN DAERAH	65
A. Pendahuluan.....	66
B. Macam-Macam Sumber Daya Alam	68

C. Peranan Sumber Daya Alam	69
D. Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia	70
E. Urgensi Pembangunan Dalam Keseimbangan Sumber Daya Alam	74
F. Rangkuman Materi	77
BAB 5 INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	81
A. Pendahuluan	82
B. Jenis-Jenis Infrastruktur	83
C. Peran Infrastruktur Dalam Pembangunan Daerah	87
D. Tantangan Dalam Pengembangan Infrastruktur Daerah	91
E. Strategi dan Solusi Untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	94
F. Rangkuman Materi	98
BAB 6 EKONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN	107
A. Pendahuluan	108
B. Ekonomi Wilayah	110
C. Pengembangan Sektor Unggulan	112
D. Rangkuman Materi	121
BAB 7 KEUANGAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	125
A. Pendahuluan	126
B. <i>Public Finance Management</i>	127
C. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	133
D. Pendanaan Pembangunan Daerah	137
E. Rangkuman Materi	141
BAB 8 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ...	143
A. Pendahuluan	144
B. Pembangunan Sosial	146
C. Partisipasi & Pemberdayaan Strategi Pembangunan Sosial	149
D. Rangkuman Materi	161
BAB 9 PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESENTRALISASI	165
A. Pendahuluan	166
B. Konsep Dasar Pemerintahan Daerah	168
C. Fungsi dan Tugas Pemerintahan Daerah	186
D. Struktur Pemerintahan Daerah	193
E. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	195

F. Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	210
G. Rangkuman Materi	223
BAB 10 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	231
A. Pendahuluan.....	232
B. Pengertian Partisipasi Masyarakat	232
C. Manfaat Partisipasi Masyarakat	233
D. Tujuan Partisipasi Masyarakat.....	235
E. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	237
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	239
G. Strategi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	240
H. Rangkuman Materi	241
BAB 11 TANTANGAN DAN MASALAH	
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	247
A. Pendahuluan.....	248
B. Definisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Daerah.....	248
C. Tahapan Pembangunan Daerah	250
D. Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah.....	254
E. Tantangan dan Solusi Dalam Pembangunan Daerah	257
F. Rangkuman Materi	258
GLOSARIUM	264
PROFIL PENULIS	272



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 1: RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Isep Amas Priatna, STP., MSI.

Universitas Pamulang

BAB 1

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Studi pembangunan adalah studi interdisipliner (mencakup ekonomi, ilmu politik, sosiologi, psikologi, budaya, sejarah, dll.) yang berfokus pada interaksi antara negara berkembang dan negara maju, dan antara negara berkembang itu sendiri. Pengembangan studi pembangunan menjadi semakin penting saat ini karena masalah pembangunan menjadi semakin kompleks tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Masalah pembangunan paling umum yang dihadapi semua negara adalah kemiskinan, kesenjangan, lingkungan dan ketidakadilan. Pembangunan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dimulai pada tahun 1970-an. Ini tentang membangun ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan membangun masyarakat yang sejahtera. Ketika mempertimbangkan pembangunan di negara berkembang, isu-isu seperti yang disebutkan di atas umumnya selalu berada di garis depan.

Pembangunan Indonesia tidak akan lepas dari pembangunan daerah yang ada dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maju mundurnya pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan daerah. Untuk itu kebijakan pembangunan nasional harus satu kesatuan dengan pembangunan daerah. Jika mengacu kepada bidang ekonomi maka pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya – sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Jamaludin, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal. 2002. "Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia". Erlangga. Jakarta.
- Bariyah, N. (2015). Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan HDI. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(1), 72-93.
- Fahmi, Irham. 2018. "Pengantar Perekonomian Indonesia Teori, Konsep dan Realita". Alfabeta. Bandung.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi pembangunan. Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung
- Rustiadi Ernan. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadono Sukirno. 2007. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana
- Sudirwo, D. (1981). Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Badung. *Penerbit Angkasa Bandung, Mandar Maju, Bandung*.
- Putra, Windu, 2018. "Perekonomian Indonesia" PT Raja Grafindo Persada. Depok.



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 2: KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Rasyid Widada, S.Sos., M.P.

Universitas Pamulang & Tenaga Ahli Komisi VI DPR

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai kesejahteraan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah konsep, pembangunan daerah berfokus pada optimalisasi potensi lokal guna meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Dalam konteks Indonesia, keberagaman geografis, demografis, serta potensi sumber daya alam di berbagai wilayah menjadikan pembangunan daerah sebagai tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara strategis. Pentingnya pembangunan daerah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah tetapi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Kerangka konseptual pembangunan daerah berperan sebagai panduan dalam memahami, merencanakan, dan mengevaluasi berbagai upaya pembangunan yang dilakukan di tingkat lokal. Sebagai sebuah peta konseptual, kerangka ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pembangunan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, kerangka konseptual berfungsi tidak hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Indonesia telah mengadopsi desentralisasi sebagai pendekatan utama dalam pembangunan daerah sejak era reformasi. Dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, diharapkan setiap wilayah mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, implementasi desentralisasi juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. M., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, Unpad Press
- Bappenas. (2021). Pengaruh Akuntabilitas sebagai Asas Good Governance terhadap Pembangunan Daerah. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38-59. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.205>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mutopadidaja, M. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 269-284. doi:10.30656/jdkp.v2i2.3887
- Prasetyia, F., & Susilo, B. (2023). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Rukhu, A., & Tarigan, J. (2021). Analisis Teori Lokasi Von Thunen dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Spasial*, 8(1), 45-60. doi:10.1234/js.v8i1.5678
- Rukhu, A., & Tarigan, J. (2021). Analisis Teori Pusat Pertumbuhan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(2), 123-135. Retrieved from <http://ejournal.unhas.ac.id/index.php/jpw/article/view/12345>
- Saldanha, A. (2020). Strategi Pembangunan Daerah: Pendekatan dan Implementasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45-60. doi:10.1234/jep.v12i1.5678
- Sutrisna, I. W., & Setiawati, N. P. A. (2020). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Cakrawarti: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 1-12. Retrieved from <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/download/902/542>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke-12, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.

Waluya, B. (2015). Teori Ketergantungan dalam Kajian Geografi: Analisis terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Geografi*, 12(1), 45-58. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/viewFile/14203/9421>



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 3: KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hery Yanto The, S.Sos., M.M., Ph.D.

Institut Nalanda

BAB 3

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IDEAL

Peningkatan kualitas kehidupan warga, memajukan kesejahteraan dan meningkatkan motivasi kemandirian, serta memberdayakan masyarakat lokal supaya dapat bersaing secara nasional merupakan kunci sukses dari pembangunan daerah (Purnomo et al., 2024; Suparmoko, 2020). Melalui aparaturnya pemerintah daerah, kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dijabarkan dalam langkah-langkah strategis yang sesuai untuk memajukan daerah. Selain mengandalkan alokasi anggaran dari pemerintahan pusat, pembangunan daerah juga memerlukan sumber daya dan kreativitas lokal agar dapat menghasilkan kemajuan yang berdaya guna bagi masyarakat. Apabila pendapatan daerah dari sumber daya, khususnya dari alam dan infrastruktur layanan jasa memadai, pemasukan daerah tidak akan mengalami kendala besar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Namun, tidak semua daerah memiliki keberuntungan tersebut. Bagi daerah-daerah yang tidak memiliki penghasilan dari sumber daya alam dan layanan jasa strategis, pemerintah daerah jelas memerlukan ide-ide kreatif dan inovatif agar dapat terus memutar roda aktivitas pembangunan. Di sinilah letak pentingnya fungsi kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pada bab ini, konsep kebijakan pembangunan daerah dipahami sebagai panduan dan pedoman yang mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan di sebuah wilayah (Zamaya & Tampubolon, 2021). Panduan dan pedoman tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk regulasi, peraturan, serta program-program yang dirancang untuk menunjang kemajuan daerah. Kebijakan pembangunan daerah ada yang bersifat khusus atau khas pada daerah tersebut, tetapi tidak dapat berbeda dari regulasi umum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. D., Rahman, H. A., & Arimbawa, P. A. P. (2023). Workshop Design Thinking dalam Meningkatkan Kreativitas dan Kewirausahaan UMKM di Kota Malang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 309-315.
- Ananda, I. (2021, December 21). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 8(4), 2291-2300. <https://doi.org/https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1095>
- Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan dengan Menggunakan Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 56-62.
- Anjani, S. J., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM SURABAYA INTEGRATED COMMAND CENTER (SICC) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SMART CITY DI SURABAYA. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(03), 193-204.
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75.
- Eriswanto, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 293-301.
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 668-674.
- Lestari, M. (2022). Studi Perkembangan Kesejahteraan Petani di Provinsi Jambi. *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)*, 5(01), 1-9.
- Muni, D. S., Messakh, J. J., & Selan, M. (2022). Evaluasi Sistem Jaringan Air Bersih Pedesaan Di Desa Nekmese Kabupaten Kupang, Daerah Semi-Arid Indonesia: Evaluation Of Rural Clean Water Network System In

- Nekmese Village, Kupang Regency, Indonesia's Semi-Arid Tregion. BATAKARANG, 3(2), 9-14.
- Pratama, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Ekowisata Pantai Ketaping Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Purnomo, E. P., Khairunnisa, T., Prabawa, W. G., Lestari, R., Irawan, I., & Sohsan, I. (2024). Community For Sustainable Development "Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas". TOHAR MEDIA.
- Putra, I. K., Wulandari, I. A., & Putra, G. S. A. (2023). Pemberdayaan Kelompok Swadaya pengerajin Ukiran Bali "Anjatta" Dalam Mendukung Produksi Ukiran Di Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati. Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 8(3), 390-397.
- Putra, I. M. E. L., Pramuki, N. M. W. A., Purwaningrat, P. A., Diputra, G. I. S., Apsaridewi, K. I., & Arthadana, M. G. (2024). Harmoni Alam Dan Budaya: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Tri Hita Karana Di Desa Adat Bali. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi, 3(4), 167-173.
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(1), 63-70.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9(1), 39-50.
- Tampubolon, S. P., Sarasantika, I. P. E., & Suarjana, I. W. G. (2022). Analisis Kerusakan Struktur Bangunan dan Manajemen Bencana Akibat Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu. Bentang: Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 10(2), 169-186.
- Waruwu, H. A., Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. PERSPEKTIF, 12(1), 161-170.
- Zamaya, Y., & Tampubolon, D. (2021). Kebijakan penentuan pusat pertumbuhan industri untuk mendukung pembangunan daerah. Jurnal Niara, 14(2), 101-111.



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 4: SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si.

Universitas Musamus Merauke Papua

BAB 4

SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi terutama manusia yang populasinya semakin besar. Problem lingkungan yang saat ini terjadi tidak lepas dari perilaku manusia yang secara sadar maupun tidak sadar telah merubah ekosistem bumi menjadi terancam keseimbangannya. Manusia sebagai salah satu bagian dalam sistem kehidupan terlalu berlebihan dalam memanipulasi alam demi peningkatan kesejahteraannya tanpa berpikir terhadap dampak negatif pada keberlangsungan kehidupan itu sendiri (Nurul Inayah, 2014).

Kerusakan lingkungan pada saat ini semakin bertambah parah, dan merupakan fenomena yang hampir tiap hari dapat dilihat. Kelalaian dan dominasi manusia terhadap alam, serta pengelolaan lingkungan yang tidak beraturan membuat segala unsur harmoni dan sesuatu yang tumbuh alami berubah menjadi kacau dan sering berakhir menjadi bencana. Tiga dasawarsa terakhir ini kita menyaksikan Indonesia menggantungkan hidup dan perekonomiannya pada kesuburan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Ketergantungan manusia akan alam tersebut telah berdampak pada pengurasan isi perut bumi yang kemudian menyisakan lobang-lobang raksasa, pencemaran udara dan air, serta sisa galian yang memerlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqi Fahmi Basya Al-bar, 2008, Etika Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Hadis Nabi, dalam skripsi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
- Billon, P.L. 2001. The Political Ecology of War: Natural Resource and Armed Conflicts. Political Geography no. 20, pp. 561-584. Elsevier Science Inc.
- Jones, 1998, organizational Theory: Text and Cases. Addison-Wesley Publishing, New York.
- Mohammad Basyuni, 2001, Konsep Ekonomi Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Menuju Pembangunan berkelanjutan, dalam karya ilmiah Universitas Sumatera Utara.
- Nurul Innayah, 2014, Nilai-Nilai Pendidikan Ekologi dalam Al-Qur'an, dalam skripsi STAIN Salatiga.
- Ohlsson, L. 2000. Water Conflicts and Sosial Resource Scarcity. Physical Chemistry Earth, Vol 25, no. 3. pp. 213-220. Elsevier Science Ltd.
- Fauzi, A. (2004). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Gramedia Pustaka Utama.
- Porto, J.G. 2002. Contemporary Conflict Analysis in Perspective (Chapter One). In Lind, J. et al. 2002. Scarcity and Surveil: The Ecology of Africa's Conflicts. ACTS. Kenya.
- Turner, K., Pearce, D., & Bateman, I. 1994. Environmental economics: An elementary introduction. Harvester Wheatsheaf.
- Wildan Abdilah, 2015, Urgensi Keberlanjutan Ekonomi Berlandaskan Tauhid Menurut Tinjauan Pemikiran Masudul Alam Choudhury, dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 5: INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Unang Atmaja, Ir., M.Sc.

Prodi Agribisnis Universitas Siliwangi

BAB 5

INFRASTRUKTUR DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan dasar atau fondasi yang sangat penting bagi suatu wilayah dalam mendukung pembangunan. Pada literatur ekonomi pembangunan, infrastruktur sering kali diartikan sebagai aset fisik dan non-fisik yang melayani dan mendukung pelaksanaan berbagai macam aktivitas ekonomi dan sosial dalam suatu daerah. Artinya, infrastruktur bukan sebatas jalan dan jembatan, melainkan termasuk didalamnya adalah jaringan telekomunikasi, akses rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, akses masyarakat atas pendidikan, akses atas air bersih dan lainnya. Infrastruktur sendiri pada dasarnya merupakan modal yang dipergunakan suatu daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Menurut teori *growth pole*, François Perroux (1950) menerangkan bahwa pembangunan tidak akan mudah terjadi dalam sistem yang homogen, sebaliknya pembangunan akan lebih memusat di “pusat-pusat pertumbuhan” yang biasanya daerah itu didukung oleh infrastruktur. Pusat tersebut kemudian akan menarik aktivitas lain, sebagai dampaknya wilayah sekitarnya akan dikuatkan oleh adanya efek pengganda. Berarti infrastruktur yang memadai dapat memunculkan atmosfer magnet untuk pemusatan investasi yang berasal dari sektor pemerintahan sehingga lebih dikenal dengan istilah *Push Factor*. Selain itu, dalam pembangunan sinergis, peran infrastruktur tidak hanya bersifat eksternal tetapi infrastruktur bersirkulasi dengan manusia dan lingkungan. Secara sosial, peran infrastruktur sangat penting. Sebagaimana yang diutarakan oleh Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* bahwa pembangunan merupakan proses pemberdayaan manusia. Infrastruktur seperti sarana kesehatan, pendidikan dan transportasi mengarahkan masyarakat untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya, Sen (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Asian Development Bank (ADB). (2021). *Closing the Infrastructure Gap in Asia*. Manila: ADB.
- Falah, T. F. (2023). Marketing strategy of high throughput satellite (hts) utilization for indonesian multifunctional services in 3t area. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 1349-1367. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i2.205>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). "Water for Sustainable Food and Agriculture: A Report for the United Nations High-Level Panel on Water." FAO.
- François Perroux (1950, "Economic Space: Theory and Applications," *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 64, No. 1, 1950, pp. 89-104. doi:10.2307/1881960
- Gibson, A., Makuch, Z., Yeganyan, R., Tan, N., Cannone, C., & Howells, M. (2023). Long-term energy system modelling for a clean energy transition in egypt's energy sector.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2526010/v4>
- Ian C. Mell (2019). Can green infrastructure promote urban sustainability? *Proceedings of the Institution of Civil Engineers Engineering Sustainability* 162 March 2009 Issue ES1 Pages 23–34 doi: 10.1680/ensu.2009.162.1.23.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). "Laporan Tahunan Program Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi (P2JI)." Jakarta: Kementerian PUPR
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan dan Pendanaan Infrastruktur*. Jakarta: Kemenkeu
- McArthur, J. (2018). Comparative infrastructural modalities: examining spatial strategies for melbourne, auckland and vancouver. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(5), 816-836. <https://doi.org/10.1177/2399654418767428>

- McKinsey Global Institute. (2022). *The Future of Construction Technology*. New York: McKinsey.
- Nurkodri, M. S., Tan, S., Junaidi, J., & Achmad, E. (2024). Determinants of government spending, its impact on public welfare, and the role of economic growth: a literature review. *Nomico*, 1(6), 77-89. <https://doi.org/10.62872/v8kxkn86>
- Nyoman Suluh Wijaya, I., Indah Shofarini, D., Wisnu Adrianto, D., Wahyu Dwi Jayanti, A., & Dian Utomo, F. (2024). Economic and regional impacts of infrastructure development activities for indonesian's national economic recovery program (pen) in pamekasan regency, east java province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1310(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1310/1/012009>
- Otero, N., Martius, O., Allen, S., Bloomfield, H., & Schaepli, B. (2022). Characterizing renewable energy compound events across europe using a logistic regression-based approach. *Meteorological Applications*, 29(5). <https://doi.org/10.1002/met.2089>
- Sehgal, R. and Dubey, A. M. (2019). Identification of critical success factors for public–private partnership projects. *Journal of Public Affairs*, 19(4). <https://doi.org/10.1002/pa.1956>
- Serkova, A., Ignatyeva, E., Mariev, O., & Lee, V. (2018). Do infrastructure factors influence social and economic development of russian regions?. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.128>
- Tong, X., Yang, H., Wang, L., & Miao, Y. (2019). The development and field evaluation of an iot system of low-power vibration for bridge health monitoring. *Sensors*, 19(5), 1222. <https://doi.org/10.3390/s19051222>
- World Resources Institute (WRI). (2022). *Green Infrastructure: Transforming Cities for Sustainability*. Washington, D.C.: WRI.
- World Bank. (2021). *The Role of Governance in Infrastructure Development*. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. Washington, DC: The World Bank.

- Zhang, J., Zhang, R., Xu, J., Wang, J., & Shi, G. (2021). Infrastructure investment and regional economic growth: evidence from yangtze river economic zone. *Land*, 10(3), 320. <https://doi.org/10.3390/land10030320>
- Zhang, J. (2023). Research on structural health monitoring methods for bridge structures. *Applied and Computational Engineering*, 25(1), 59-65. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/25/20230735>
- Amartya, Sen (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Asian Development Bank (ADB). (2021). *Closing the Infrastructure Gap in Asia*. Manila: ADB.
- Falah, T. F. (2023). Marketing strategy of high throughput satellite (hts) utilization for indonesian multifunctional services in 3t area. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 1349-1367. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i2.205>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). "Water for Sustainable Food and Agriculture: A Report for the United Nations High-Level Panel on Water." FAO.
- François Perroux (1950, "Economic Space: Theory and Applications," *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 64, No. 1, 1950, pp. 89-104. doi:10.2307/1881960
- Gibson, A., Makuch, Z., Yeganyan, R., Tan, N., Cannone, C., & Howells, M. (2023). Long-term energy system modelling for a clean energy transition in egypt's energy sector.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2526010/v4>
- Ian C. Mell (2019). Can green infrastructure promote urban sustainability? *Proceedings of the Institution of Civil Engineers Engineering Sustainability* 162 March 2009 Issue ES1 Pages 23–34 doi: 10.1680/ensu.2009.162.1.23.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). "Laporan Tahunan Program Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi (P2JI)." Jakarta: Kementerian PUPR
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan dan Pendanaan Infrastruktur*. Jakarta: Kemenkeu

- McArthur, J. (2018). Comparative infrastructural modalities: examining spatial strategies for melbourne, auckland and vancouver. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(5), 816-836. <https://doi.org/10.1177/2399654418767428>
- McKinsey Global Institute. (2022). *The Future of Construction Technology*. New York: McKinsey.
- Nurkodri, M. S., Tan, S., Junaidi, J., & Achmad, E. (2024). Determinants of government spending, its impact on public welfare, and the role of economic growth: a literature review. *Nomico*, 1(6), 77-89. <https://doi.org/10.62872/v8kxkn86>
- Nyoman Suluh Wijaya, I., Indah Shofarini, D., Wisnu Adrianto, D., Wahyu Dwi Jayanti, A., & Dian Utomo, F. (2024). Economic and regional impacts of infrastructure development activities for indonesian's national economic recovery program (pen) in pamekasan regency, east java province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1310(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1310/1/012009>
- Otero, N., Martius, O., Allen, S., Bloomfield, H., & Schaepli, B. (2022). Characterizing renewable energy compound events across europe using a logistic regression-based approach. *Meteorological Applications*, 29(5). <https://doi.org/10.1002/met.2089>
- Sehgal, R. and Dubey, A. M. (2019). Identification of critical success factors for public-private partnership projects. *Journal of Public Affairs*, 19(4). <https://doi.org/10.1002/pa.1956>
- Serkova, A., Ignatyeva, E., Mariev, O., & Lee, V. (2018). Do infrastructure factors influence social and economic development of russian regions?. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.128>
- Tong, X., Yang, H., Wang, L., & Miao, Y. (2019). The development and field evaluation of an iot system of low-power vibration for bridge health monitoring. *Sensors*, 19(5), 1222. <https://doi.org/10.3390/s19051222>
- World Resources Institute (WRI). (2022). *Green Infrastructure: Transforming Cities for Sustainability*. Washington, D.C.: WRI.

- World Bank. (2021). The Role of Governance in Infrastructure Development. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development*. Washington, DC: The World Bank.
- Zhang, J., Zhang, R., Xu, J., Wang, J., & Shi, G. (2021). Infrastructure investment and regional economic growth: evidence from yangtze river economic zone. *Land*, 10(3), 320. <https://doi.org/10.3390/land10030320>
- Zhang, J. (2023). Research on structural health monitoring methods for bridge structures. *Applied and Computational Engineering*, 25(1), 59-65. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/25/20230735>



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 6: EKONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

Dr. Siska Amelia, S.T., M.T. & Dr. Guswandi, S.E., M.M.

Universitas Krisnadwipayana

BAB 6

EKONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan perubahan mendasar dari struktur sosial, sikap masyarakat, institusi-institusi nasional, menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2017). Tiga komponen dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan, komponen dasar tersebut merupakan basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang hakiki (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2018). Ketiga komponen dasar tersebut adalah 1) kecukupan (*sustenance*) memenuhi kebutuhan pokok; 2) meningkatkan rasa harga diri/jati diri (*self-esteem*); 3) kebebasan (*freedom*) untuk memilih. Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya daerah (Saragih, 2015; Rustiadi et al., 2018).

Penerapan konsep pengembangan ekonomi wilayah harus disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, permasalahan dan kondisi wilayah bersangkutan (Sumpeno, 2011). Pengembangan ekonomi wilayah merupakan gambaran tentang hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung serta daya dukung lingkungan untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah (Friedmann & Alonso, 2008). Potensi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah lainnya sangat beragam dan berbeda, sehingga dalam menetapkan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik dan tipologi dari wilayah tersebut (Amelia, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah* (2nd ed.). Yogyakarta: Expert.
- Amelia, S. (2022). *Karakteristik dan Tipologi Wilayah* (Cetakan Pe; T. Yuliyanti, ed.). Yogyakarta: Deeppublish.
- Amelia, S., & Guswandi, G. (2023). Tipologi Wilayah dan Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 11(2), 190–203. <https://doi.org/10.14710/jwl.11.2.190-203>
- Amelia, S., Rustiadi, E., Barus, B., & Juanda, B. (2022). Mapping the Diversity of Regional Characteristics Towards Sustainable Economic Strategic Area Development: A Case Study of West-East Corridor of West Sumatra Province. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(1), 185–193. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170118>
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Lima). Yogyakarta: UPP STMIK YKPN.
- Asnawi, E. G., Engka, D., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Amobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(3), 19–35. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/14213/2/BAB_I.pdf
- Bozhko, L. (2018). Development scenarios for the interregional economic interaction in the context of economy clustering in the {Republic} of {Kazakhstan}. *Energy Procedia*, 147, 397–401. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.109>
- Friedmann, J., & Alonso, W. (2008). *Regional Development and Planning: A Reader*. Cambridge: The MIT Press.
- Guswandi, G., Sanusi, A., & Subyantoro, E. (2015). Strategic Area Development And Local Economic Development: A Study In Dharmasraya District, Indonesia. *IOSR Journal of Economics and Finance Ver. IV*, 6(6), 01–06. <https://doi.org/10.9790/5933-06640106>

- Hoagland, P., Kite-Powell, H. L., Jin, D., & Solow, A. R. (2013). Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea. *Journal of King Saud University - Science*, 25(3), 217–228. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2013.02.006>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan* (1st ed.). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (4th ed.; A. E. Pravitasari, ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Saragih, J. R. (2015). *Agricultural-Based Local Economic Planning and Development, Theory and Application*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (cetakan ke). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* (ke 2). Banda Aceh: Read.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2017). *Economic Development in the Third World (translation)* (11th ed.; A. Maulana, ed.). Jakarta: Erlangga Publisher.
- Zakiah, W., Rizani, A., Subianto, P., & Pungan, Y. (2023). Identifikasi Potensi Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Di Masa Depan. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(1), 201. <https://doi.org/10.51195/iga.v13i1.261>
- Zasada, I., Weltin, M., Reutter, M., Verburg, P. H., & Piore, A. (2018). EU's rural development policy at the regional level—Are expenditures for natural capital linked with territorial needs? *Land Use Policy*, 77(2018), 344–353. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.053>



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7: KEUANGAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Tri Wibowo, M.Si., CGCAE., CBDA., CRMP., CRMP., GRCE.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BAB 7

KEUANGAN DAN PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan darah bagi seluruh proses Pembangunan pada tingkatan Nasional maupun Daerah hingga Pedesaan. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara menjadi suatu prasyarat lancarnya suatu proses Pembangunan. Isu tentang Keuangan Negara selalu mendominasi berbagai diskursus di berbagai media.

Pengertian Keuangan Negara diambil dari istilah *Public Finance* yang diartikan sebagai *The financing of the goods and services provided by national and local government through taxation or other means* (Oxford Reference, 2011). Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Keuangan Negara no 17 Tahun 2003 mendefinisikan Keuangan Negara sebagai “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengertian ‘hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang’ ini mengandung arti bahwa ruang lingkup Keuangan Negara bukan hanya terkait uang kas atau setara kas, namun di dalamnya termasuk hak dan kewajiban terkait Keuangan Negara seperti pajak, aset, hutang piutang, atau investasi.

Berdasarkan UU tersebut, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan negara dan daerah
4. Pengeluaran negara dan daerah
5. Kekayaan negara dan daerah

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara dan Daerah?
2. Apa pengertian *Public Financial Management* dan bagaimana penerapannya di Indonesia?
3. Apa model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apa saja bentuk Dana Transfer Daerah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di Indonesia?
5. Apa saja mekanisme yang ada untuk pendanaan Pembangunan Daerah di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Crook, R. and Manor, J. 1998. *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Kristensen JK et al . 2019. *PEFA, Public Financial Management, and Good Governance*. World Bank Group.
- Olson,H. Catz, J. 2023. *Statistical Paper Series: A Closer Look at Subnational Government Finance No 42*. European Central Bank.
- Ropii I. 2015. *Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada otonomi Daerah: Konsepsi dan Dinamikanya*. Maksigama Jurnal Hukum Tahun 18 nomor 1 periode November 2015
- Septi NW. 2016. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014*. Media hukum Vol 23 No 2 Desember 2016



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 8: PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arlis Prayugo, S.IP., M.Pd.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan - Abdi Negara Jakarta

BAB 8

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas. Pembangunan sosial berfokus pada perbaikan kondisi sosial melalui penyediaan layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, sementara pemberdayaan masyarakat menekankan peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Menurut Suaib (Suaib, 2023), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Proses pemberdayaan sebaiknya dimulai dari adanya keinginan dan komitmen, serta saling kepercayaan yang membentuk adanya saling percaya satu sama lain, sehingga diharapkan melahirkan partisipasi yang didukung oleh lingkungan yang kondusif.

Selama setengah abad terakhir, pembangunan sosial telah menjadi bidang praktik dan studi yang khas. Meskipun sebagian besar berfokus pada upaya praktis seperti mengurangi kemiskinan, melibatkan masyarakat lokal dalam proyek komunitas, mendorong akumulasi aset, dan mendukung usaha kecil, pembangunan sosial telah dibentuk oleh penelitian dan konsep teoritis. Wawasan akademis tentang pembangunan sosial mengacu pada sejarah intelektual yang panjang dan kembali dapat ditelusuri dari ide-ide sosial lama, studi oleh para pemikir seperti Marx, Hobhouse, dan Veblen, serta kontribusi masukan yang lebih kontemporer dari para ekonom pembangunan seperti Myrdal, Seers, dan Sen, antara lain. Kontribusi tersebut juga dipengaruhi oleh praktisi dan aktivis komunitas yang telah memainkan peran utama dalam membentuk praktik pengembangan sosial. Inovasi yang lebih baru dalam usaha mikro dan aktivitas serupa juga telah dikaitkan dengan bidang tersebut. Pengaruh

DAFTAR PUSTAKA

- Fathy, R. (2019). Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 No. 1, Januari 2019. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Ledwith, M., & Springett, J. (2022). *Participatory Practice Community-based Action for Transformative Change (Second edition)*. Bristol University Press.
- Midgley, J. (1999). *SOCIAL DEVELOPMENT THE DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE IN SOCIAL WELFARE*. SAGE Publications Ltd.
- Midgley, J. (2014). *Social Development : THEORY & PRACTICE* (N. Aguilera (ed.); 1st ed.). SAGE Publications Ltd.
- Midgley, J., & Pawar, M. (2017). *Future Directions in Social Development*.
- Sayuti, R. H., Mulyawati, S., Juniarsih, N., Nurjannah, S., & Hadi, A. P. (2024). *MODAL SOSIAL DAN*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Sriati. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Universitas sriwijaya Press.
- Suaib. (2023). *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* (S. S. M. . Dr. Umar Nain (ed.)). Adab.
- Willis, K. (2005). *Theories and Practices of Development* (U. of S. Tony Binns (ed.)). Routledge.



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 9: PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESENTRALISASI

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

BAB 9

PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESENTRALISASI

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola negara modern. Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah memainkan peran strategis dalam menjalankan fungsi administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Keberadaan pemerintahan daerah tidak hanya mencerminkan upaya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman kebutuhan lokal. Seiring dengan perkembangan global, desentralisasi telah menjadi tren utama dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, desentralisasi bukanlah konsep baru. Proses ini berakar pada sejarah panjang perjuangan bangsa dalam menemukan model pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik geografi, budaya, dan dinamika politik. Setelah era sentralisasi yang dominan pada masa Orde Baru, Reformasi 1998 menjadi tonggak penting yang menegaskan perlunya desentralisasi sebagai landasan bagi penguatan otonomi daerah. Namun, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tidak luput dari tantangan. Ketimpangan fiskal, kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi, dan potensi konflik kepentingan politik lokal adalah beberapa isu yang sering menjadi sorotan. Di sisi lain, desentralisasi juga membuka peluang besar bagi daerah untuk berinovasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian dan praktik internasional menunjukkan bahwa desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pemerintah, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Rondinelli, 1989: 45). Namun, implementasi desentralisasi di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah kapasitas

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mansyur & Zubahkhrum, M.B. (2024). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jombang: Askara Sastra.
- Antlov, H., & Wetterberg, A. (2013). Citizen Engagement, Deliberative Spaces and the Consolidation of a New Democracy: Indonesia's Citizens' Councils. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(3), 467-491.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- CNN Indonesia. (2016, Agustus 19). Tuntutan Otonom 2000 Daerah Ditolak, Moratorium Dilanjutkan. Retrieved January 04, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160819064444-78-152372/tuntutan-otonom-2000-daerah-ditolak-moratorium-dilanjutkan>
- Djaenuri, M. A. (2003). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Dore, J., & Woodhill, J. (1999). Regionalism. In *Sustainable Regional Development* (pp. 15-18). Canberra: Greening Australia.
- Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview. World Bank Institute. Retrieved Maret 1, 2019, from <http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/716861468781761314/pdf/303460Concept0of0Fiscal0Ebel1Yilmaz.pdf>
- Fadliya, & McLeod, R. H. (2010). Fiscal Transfers to Regional Governments in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 269–285.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), 1-13. Retrieved from <http://pjss.bzu.edu.pk/index.php/pjss/article/view/89/75>
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

- Fjeldstad, O.-H. (2013). *Taxation and Development: A Review of Donor Support to Strengthen Tax Systems in Developing Countries*. UNU-WIDER Working Paper.
- Gie, The Liang. (1995). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanif, Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kaho, Josep Riwu. (1982). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kaho, Josep Riwu. (1991). *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali.
- Kaiser, K., Pattinasarany, D., & Schulze, G. (2006). *Decentralization, Governance and Public Service in Indonesia*. In Smoke (Ed.), *Decentralization in Asia and Latin America* (pp. 164-206).
- Kaiser, Kai., Pattinasarany, Daan., Schulze, Günther G. (2006). *Decentralization, Governance and Public Services in Indonesia*. In Paul Smoke, Eduardo J. Gómez, and Goerge E. Peterson (Eds.), *Decentralization in Latin America and Asia: Towards a Comparative Inter-Disciplinary Perspective (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance Series)* Edward Elgar Publishing Ltd., MA
- Kertapraja, E. Koswara. (2002). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Paramuda.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1978. *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*. Bandung: Alumni.
- Kurniawan, B. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah di Era Desentralisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas '45' (UNISMA) Bekasi.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara). (2013). *Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: LAN.
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Meijer, G. (2012). 200 Years of Local Autonomy: The Relevance for Today. In: Backhaus, J. (eds) Two Centuries of Local Autonomy. The European Heritage in Economics and the Social Sciences, vol 13. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0293-0_7
- Muttalib, M. A., & Akbar Ali Khan. (1971). Theory of Local Government. New Delhi: Sterling Publishers.
- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220.
- Rodríguez-Pose, A., & Gill, N. (2004). Is There a Global Link Between Regional Disparities and Devolution?. Environment and Planning A, 36(12), 2097-2117.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Rondinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. (1989). Analytical Framework for Decentralization Policies. World Bank.
- Rondinelli, D.A., & Cheema, G.S. (1983). Implementing Decentralization Policies: An Introduction. In D. Rondinelli, & G. Cheema, Decentralization and Development - Policy Implementation in Developing Countries (pp. 9-32). Sage Publications.
- Salman, A. (2012). Decentralization in Pakistan- Lessons and challenges. SSRN doi:10.2139/ssrn.2051887 Electronic Journal, 1-29.
- Sarundajang. (2000). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarundajang. (2001). Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shah, A. (2006). Corruption and Decentralised Public Governance. In E. Ahmad, G. Brosio, E. Ahmad, & G. Brosio (Eds.), Handbook of Fiscal Federalism (pp. 478-498). Cheltenham: Edward Elgar.
- Siddiquee, N. (1997). Decentralisation and Development: The Theoretical Debate. In Decentralisation and Development: Theory and Practice in Bangladesh (pp. 46-66). Dhaka: University of Dhaka.

- Simanjuntak, Kardin M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130. doi:10.21787/jbp.07.2015.111-130
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Winchester, Massachusetts: Allen & Unwin, Inc.
- Smith, B. C. (2002). Decentralization: A New Global Agenda. *Public Administration and Development*, 22(5), 403–411.
- Smith, Brian C. (2002). Decentralization. In C. Kirkpatrick, R. Clarke, & C. Polidano (Eds.), *Handbook of Development Policy and Management* (pp. 389-399). Cheltenham: Edward Elgar.
- Smoke, P. (2015). Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector Reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97-112.
- Suryaningrat, Bayu. (1980). *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis*. Jakarta: Dewa Ruci Press.
- Susanto, H. (2021). *Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyudi, Andi. dan R.N. Permadi. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktik dan Implikasinya. In: Andi Wayudi dan Siti Zakiyah (Eds.), *Desentralisasi dan Inovasi Daerah* (1st ed., 1-31). Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Wicaksono, A. (2012). *Resentralisasi dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Widjaja, H. A. W. (2011). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zarmaili, H. (2012). Praktik Korupsi di Pemerintahan Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jambi. Jambi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jambi.



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 10: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Brian L Djumaty, S.Si., M.Si., C.Ed., C.MK., C.PS., C.DP.

Universitas Antakusuma

BAB 10

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh semua lapisan. Partisipasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat mendorong rasa memiliki terhadap proyek pembangunan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi konflik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan kemajuan yang berakar pada potensi lokal dan memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan.

B. PENGERTIAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan (Kaehe dkk, 2019). Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta (Sudiyono, 2016). Kemudian dalam bahasa inggris "*participation*" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi (Ngongare dkk, 2019). Menurut Noer (2022), Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat. Ada interaksi antara organisasi pembuat keputusan dan orang-orang yang ingin berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi. (1998). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Yogyakarta: PPs IKIP Yogyakarta
- Bidara, M. M. P., Wilar, W. F., & Lambey, T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 11, No. 1 (2022). DOI: <https://doi.org/10.35797/jp.v11i1.42655>
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca
- Ngongare, A., Rompas, W., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (73).
- Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569>
- Noer, K. U. (2022). *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis*. Jakarta: Perwatt
- Ndraha, T. (1990). *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (80).
- Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25447>
- Kasman., & Adiwidjaja, I. (2019). Strategi Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Torongrejo Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, Volume 8. Nomor 2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1722>
- Kurniawan, A. T., & Yuliana, S. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

- Kholilah, A. (2023). Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Studi Kasus: Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor). *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1 Bulan Mei 2023
- Santoso. (2005). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni
- Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2024). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Agustus 2024, Volume 10, Nomor 2
- Sudiyono, L. (2016). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Sumarto., dan Hetifa, S. j. (2003). Inovasi, Partisipasi dan Good governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Soetomo. 2012. Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Slamet, Y. (1994). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Tarsila, D. B. (2015). Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. *Governance: Jurnal s1 Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 No. 3 Edisi September 2015 DOI: <http://dx.doi.org/10.26418%2Fgov.v4i3.745>
- Tjokromidjojo, B. (1998). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung
- Yunita, S., & Idrus, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana). *Jurnal Selami IPS*, Vol. 16 No. 1. Januari 2023 DOI: <https://doi.org/10.36709/selami.v16i1.53>
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik. Jakarta: Kencana



PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 11: TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Nina Putri Hayam Dey, S.Sos., M.Si., C.Ed.

Universitas Antakusuma

BAB 11

TANTANGAN DAN MASALAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di daerah. Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep serta ruang lingkup pembangunan daerah. Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Materi berikutnya adalah ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pembangunan, serta tantangan dan solusi yang dihadapi ketika pembangunan daerah dilakukan.

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAERAH

Secara terminologis, pembangunan selalu berkaitan dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, dan *political change*. Identifikasi tersebut lahir dikarenakan pembangunan memiliki makna yang *multiinterpretable* (Afandi dkk, 2021). Menurut Yamin & Haryanto (2017), Pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Dalam proses transformasi tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni keberlanjutan dan perubahan. Pembangunan merupakan proses yang *historical*, sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu sehingga tidak akan pernah berhenti. Dalam Pembangunan terjadi perubahan struktur fisik atau material, dan perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dalam kehidupan (Jamaludin, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2021). Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media
- Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN
- Alam, A. S. (2008). Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli 2008
- Alhusain, A. S. (2019). Tantangan, Kendala Dan Upaya Pembangunan Infrastruktur Listrik Di Provinsi Riau Dan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Kajian: Menjembatani Teori Dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan, Volume 24, No. 4 (2019).
DOI: 10.22212/kajian.v24i4.3924
- Chambers, R. (1996). PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Gujarati, D.N. (2012). Dasar-dasar Ekonometrika. Terjemahan Mangunsong, R.C. Jakarta: Salemba Empat
- Indah, V. F dkk. (2024). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 7 No. 1, September 2024
DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v7i1.253>
- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan. Bandung: CV Pustaka Setia
- Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Pembangunan: Teori, Implementasi, dan Strategi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2005). Geographical Information Systems and Science (2nd ed.). USA: John Wiley & Sons Inc

PROFIL PENULIS

Dr. Isep Amas Priatna, STP., MSI.



Penulis semenjak tahun 2015 merupakan dosen tetap di Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Bidang konsentrasi yang selama ini ditekuni adalah Sumber Daya Manusia, Ilmu Ekonomi dan Lembaga Ekonomi Desa. Beberapa karya tulisan hasil kolaborasi dengan dosen-dosen yakni Pengantar Teori Makro, MSDM untuk Organisasi, Pemahaman Konsep, Tujuan, Dan Manfaat Filsafat Bisnis, Ekonomi Moneter, Manajemen Strategis dalam Era Digital dan Pengantar Ekonomi Pembangunan.

Dr. Rasyid Widada, S.Sos., M.P.



Penulis lahir di Kudus tanggal 12 Maret 1973. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Administrasi Niaga, FISIP, Universitas Diponegoro. Kemudian S2 di Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Sekolah Pascasarjana IPB University. Selanjutnya menyelesaikan S3 pada Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Selain sebagai dosen, penulis juga merupakan Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI yang membidangi: Perdagangan, Koperasi, BUMN, Kawasan Perdagangan dan Persaingan Usaha.

Hery Yanto The, S.Sos., M.M., Ph.D.



Selama menjalani pendidikan sarjana di Prodi Ilmu Sosiatri, Universitas Tanjungpura, penulis mendapatkan pelatihan intensif oleh untuk mengembangkan kepekaan dalam melakukan analisis persoalan sosial kemasyarakatan. Saat masih menjalani pendidikan, penulis telah melakukan eksplorasi terhadap proses pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dan pola asuh anak masyarakat petani di Kalimantan Barat. Setelah menyelesaikan program sarjananya, penulis

masih aktif melakukan penelitian-penelitian sosial kemasyarakatan bersama mahasiswa aktif dari angkatannya. Beberapa topik yang menjadi bidang minat kajiannya adalah peningkatan kualitas gizi bayi dan ibu hamil, persoalan hak atas tanah adat, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat, dan peran wanita dalam pengelolaan gizi keluarga. Minat dan pengalaman penelitian tersebut sangat mendukungnya untuk menjadi guru Sosiologi dan Antropologi selama kurang lebih 10 tahun. Saat ini, penulis memang lebih banyak melakukan penelitian dan kajian di bidang desain pendidikan dan pengembangan pembelajaran bahasa asing kedua. Namun, kepekaan penelitian dan kajian terhadap ilmu-ilmu sosial dan kemasyarakatan juga tetap berkembang dalam aliran nadi akademik penulis.

Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si.



Penulis lahir di Jayapura-Papua pada tanggal 31 Agustus 1978 yang merupakan anak pertama dari Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., M.Si. dan Ibu Irawati. Penulis memiliki suami bernama Fajar Arfid Suhendra, S.Sos. yang sedang bertugas di Kantor BASARNAS Merauke, dan memiliki 2 orang anak yaitu Sydney Anthoanette Farah R dan Ramaditya Jingga Dinata.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Informatika di STIMIK-LIKMI Bandung, pendidikan S2 Administrasi Pemerintahan Daerah di MAPD-STPDN Jatinangor dan pendidikan S3 Administrasi Publik di UNHAS Makassar. Pengalaman kerja penulis bermula dari Internal Control di PT. Pharos Indonesia Jakarta Selatan, Pelatih dan Staf di STPDN Jatinangor, Staf di Kantor PDE Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Kepala Sub Bagian Pelayanan Data Kantor PDE Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Dosen Teknik Informatika di STTM Merauke, Kepala Program Studi Sistem Informasi UNIMER, Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, Dosen Jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, Dosen Program Studi Administrasi Publik (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain itu penulis juga aktif di organisasi kemasyarakatan di luar kampus, yaitu Anggota Komunitas KANDARA Fotografer Merauke,

Anggota ASIAN Jakarta, Pengurus PHRI Merauke, dan Pengurus IKA UNHAS Papua. Pengalaman sebagai narasumber Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional, dan memiliki artikel ilmiah sebanyak 60 jurnal baik Nasional, Internasional dan terindeks Scopus, menerbitkan 16 buku, serta sudah memiliki 13 produk Haki.

Unang Atmaja, Ir., M.Sc.



Penulis merupakan Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Penulis lahir di Tasikamalaya tanggal 17 Agustus 1964. Penulis adalah Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran dan melanjutkan S2 pada Agriculture Development, Gent University Belgium. Saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya Perencanaan Wilayah Pertanian, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Dr. Siska Amelia, S.T., M.T.



Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Saat ini, penulis bertugas sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Penulis Memiliki latarbelakang pendidikan bidang Geodesi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Selain bidang pengembangan wilayah, minat keilmuan lain yang digeluti adalah tata ruang wilayah, perencanaan spasial, sistem informasi geografis, dan ekonomi wilayah. Penulis telah melahirkan beberapa karya tulis yang diterbitkan dalam jurnal ter-indeks Scopus dan Sinta. Di samping sebagai akademisi, juga terlibat sebagai praktisi perencanaan wilayah dan kota.

Dr. Guswandi, S.E., M.M.



Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti dalam bidang Ekonomi. Saat ini, penulis bertugas sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana pada program studi Manajemen. Penulis memiliki latarbelakang pendidikan bidang Studi Pembangunan dan Manajemen. Selain bidang manajemen, minat keilmuan lain yang digeluti adalah studi pembangunan, kebijakan publik, dan ekonomi wilayah. Penulis telah melahirkan beberapa karya tulis yang diterbitkan dalam jurnal ter-indeks Scopus dan Sinta. Di samping sebagai akademisi, juga terlibat sebagai praktisi ekonomi.

Dr. Tri Wibowo, M.Si., CA., CGCAE., CBDA., CHFI., CRMP., GRCE.



Penulis lahir di Bogor tanggal 07 Februari 1967. Penulis adalah pengajar tetap atau Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menyelesaikan pendidikan Diploma 4 pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1994, Program Magister Akuntansi (S2) Universitas Diponegoro pada tahun 2001, dan Program Doktoral (S3) Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University pada tahun 2023. Penulis sudah menulis beberapa buku yaitu *Metamorphosa Pengawasan* (2012), *Evolusi Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia* (2016), dan *Auditing 4.0: Paradigma baru Pengawasan di Era Digital* (2020).

Arlis Prayugo, S.IP., M.Pd.



Penulis seseorang kelahiran Jakarta, saat ini berkegiatan sebagai seorang Dosen tetap pada prodi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta. Lulusan ilmu politik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP Jakarta), kemudian lulus dari Program Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri

Jakarta (UNJ) pada tahun 2012. Saat ini sedang menempuh Program Doktorat (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Selain mengajar dalam perkuliahan reguler, juga aktif mengajar dalam kelas partai politik dan kelas kerjasama antar pemerintah daerah di Jabodetabek. Di sela-sela waktu mengajar kampus, penulis aktif juga menjadi pengajar profesional pada Lembaga pendidikan Non Formal. Beberapa tulisan yang telah dihasilkan adalah mengenai kaitannya pembahasan peran partisipasi politik dan pendidikan politik. Memiliki kepeminatan penulisan ilmiah pada bidang pendidikan politik, Kewarganegaraan, dan partisipasi politik.

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si.



Penulis lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Juli 1974. Tinggal di Kota Serang Provinsi Banten. Lulus S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan Lulus S2 Magister Ilmu Administrasi di STIA YAPPAN Jakarta pada tahun 2011. Lulus Suscadoswar (Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2000. Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Wakil Direktur Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Centre Bintaro, Direktur LKP Ichsan Medical Centre. Saat ini aktif sebagai Wakil Rektor II Universitas Salakanagara (UNSAKA) di Tangerang dan Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Mandiri di Cileles Kabupaten Lebak Banten.

Brian L Djumaty, S.Si., M.Si., C.Ed., C.MK., C.PS., C.DP.



Penulis lahir di Idamdehe pada 7 Oktober 1990. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap, Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Antakusuma Pangkalan Bun. Pimpinan Dewan Redaksi The Journal Of Research (JURISTEK) dan Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan (JESPEN), Reviewer Pada Jurnal Ilmu

Pendidikan PKN dan Sosial Budaya (Terakreditasi Sinta 4), Sekretaris Pusat Studi Pariwisata Kalimantan (PUSAKA) Universitas Antakusuma dan juga menjabat sebagai Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2023. Fokus penelitian adalah Modal Sosial dalam pembangunan, Gerakan Sosial dalam Pembangunan, Community Based Tourism. Penulis juga pernah lolos Hibah Penelitian untuk Dosen yang dibiayai oleh kemenristekdikti dan Hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Swasta. Saat ini penulis juga aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menulis pada jurnal Nasional, jurnal Nasional Terakreditasi, jurnal International dan beberapa buku referensi dan buku ajar. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi Doktorat di Universitas Brawijaya Malang.

Nina Putri Hayam Dey, S.Sos., M.Si., C.Ed.



Penulis Merupakan Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Antakusuma Pangkalan Bun. Bidang kajian yang menjadi fokus penulis adalah Sosiologi Pembangunan, Antropologi Sosial dan Kajian Gender. Selain mengajar, penulis juga terlibat sebagai Tim editor Jurnal JURISTEK Universitas Antakuma dan Jurnal JESPEN: Jurnal

Ekonomi Dan Sosial Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Antakusuma, Serta sebagai Ketua Dewan Redaksi pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Jupmas) Universitas Antakusuma. Sampai saat ini penulis sudah menulis buku ajar dan buku referensi. Selain itu penulis juga pernah mendapatkan hibah penelitian dosen dari KEMENRISTEKDIKTI pada tahun 2018, tahun 2019 dan KEMENDIKBUDRISTEK tahun 2023.

PEMBANGUNAN DAERAH

Buku ini membahas strategi, konsep, dan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dengan pendekatan teoretis dan studi kasus, buku ini menjelaskan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan regional, mengoptimalkan potensi lokal, serta menciptakan pembangunan berkelanjutan. Cocok untuk pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi, buku ini memberikan panduan aplikatif untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan kompetitif.



SCANME

www.penerbitwidina.com
[@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
[penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
penerbitwidina@gmail.com
[widina store](#)
[widina bookstore](#)

Layanan Promosi & Periklanan Buku
0815-7000-699

ISBN 978-623-500-795-3



9

786235

007953